

**PERAN MODAL SOSIAL TERHADAP KINERJA BPP
(BALAI PENYULUHAN PERTANIAN) DI KECAMATAN TOMBOLO
PAO, KABUPATEN GOWA**

OLEH :

UMRAH PUJI ASTUTY

G211 16 522



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
DEPARTEMEN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

**PERAN MODAL SOSIAL TERHADAP KINERJA BPP
(BALAI PENYULUHAN PERTANIAN) DI KECAMATAN TOMBOLO
PAO, KABUPATEN GOWA**

OLEH:

UMRAH PUJI ASTUTY

G211 16 522

Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian
Pada:

Program Studi Agribisnis
Departemen Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian
Universitas Hasanuddin
Makassar
2021

Disetujui Oleh :

Prof. Dr. Ir. Mujahidin Fahmid, M.T.D
Pembimbing Utama

Ir. Tamzil Ibrahim, M.Si.
Pembimbing Pendamping

Mengetahui :

Ketua Departemen Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian
Universitas Hasanuddin
Makassar

2021

Dr. A. Nixia Tenriawaru, S.P., M.Si
NIP. 19721107-199702 2 001

Tanggal Pengesahan : Februari 2021

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umrah Puji Astuty
NIM : G211 16 522
Fakultas : Pertanian
HP : 082 190 786 939
E-mail : umrah_pujiastuty24@yahoo.co.id

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi "Peran Modal Sosial terhadap Kinerja BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa" benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, Februari 2021



Umrah Puji Astuty

**PANITIA UJIAN SARJANA
DEPARTEMEN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

JUDUL : PERAN MODAL SOSIAL TERHADAP KINERJA BPP
(BALAI PENYULUHAN PERTANIAN) DI KECAMATAN
TOMBOLO PAO, KABUPATEN GOWA

NAMA MAHASISWA : UMRAH PUJI ASTUTY

NOMOR POKOK : G211 16 522

SUSUNAN TIM PENGUJI

Prof. Dr. Ir. Mujahidin Fahmid, M.T.D.
Ketua Sidang

Ir. Tamzil Ibrahim, M.Si.
Anggota

Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, M.S.
Anggota

Ir. Nurdin Lanuhu, M.P.
Anggota

Tanggal Ujian : 10 Februari 2021

**PERAN MODAL SOSIAL TERHADAP KINERJA BPP
(BALAI PENYULUHAN PERTANIAN) DI KECAMATAN TOMBOLO PAO,
KABUPATEN GOWA**

**Umrah Puji Astuty*, Mujahidin Fahmid, Tamzil Ibrahim,
Darmawan Salman, Nurdin Lanuhu**
Program Studi Agribisnis, Departemen Sosial Ekonomi Pertanian,
Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, Makassar
*Kontak Penulis: umrah_pujiastuty24@yahoo.co.id

ABSTRAK

Peran modal sosial terdiri dari tiga antara lain *Sharing Information*, *Coordinating Activities*, dan *Making Collective Decision*. *Sharing Information* atau berbagi informasi yaitu tindakan setiap individu dalam menyampaikan informasi yang tepat untuk membuat keputusan yang efektif dan efisien. *Coordinating Activities* yaitu dimana setiap individu mengkoordinasikan segala aktivitas atau pekerjaan yang akan atau sedang dijalani agar lebih memudahkan dalam melaksanakan tindakan dan pengambilan keputusan. *Making Collective Decision* yaitu dimana setiap individu akan membuat keputusan secara bersama-sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur modal sosial yang terjalin antara petani dengan anggota/pengurus BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) serta peran modal sosial terhadap kinerja BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur modal sosial yang terjalin antara petani dengan BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) di Kecamatan Tombolo Pao memiliki tingkat kepercayaan (*trust*) yang sangat tinggi, jaringan (*networking*) yang sangat luas, hubungan timbal balik (*reciprocity*) yang terjalin sangat baik, serta norma-norma (*norms*) yang diterapkan sangat baik oleh seluruh elemen masyarakat di Kecamatan Tombolo Pao. Serta peran modal sosial yang berperan penting dengan baik dalam proses kinerja BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) di Kecamatan Tombolo Pao. Dengan terjalinnya interaksi yang baik berdasarkan unsur-unsur modal sosial, UPT Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tombolo Pao lebih mudah melaksanakan program-program kerjanya.

Kata Kunci: Modal Sosial, Peran Modal Sosial, BPP (Balai Penyuluhan Pertanian).

**ROLE OF SOCIAL CAPITAL ON THE PERFORMANCE OF BPP
(AGRICULTURE EXTENSION CENTER) IN TOMBOLO PAO DISTRICT,
GOWA REGENCY**

**Umrah Puji Astuty*, Mujahidin Fahmid, Tamzil Ibrahim,
Darmawan Salman, Nurdin Lanuhu**

*Agribusiness Study Program, Department of Agricultural Socio-Economics,
Faculty of Agriculture, Hasanuddin University, Makassar*

** Author Contact: umrah_pujiastuty24@yahoo.co.id*

ABSTRACT

The role of social capital consists of three, including Sharing Information, Coordinating Activities, and Making Collective Decisions. Sharing Information or sharing of information is the action of each individual in conveying the right information to make effective and efficient decisions. Coordinating Activities, where each individual coordinates all activities or work that will be or is being undertaken to make it easier to carry out actions and decision making. Making Collective Decision, which is where each individual will make decisions together. The purpose of this study was to determine the elements of social capital that were intertwined between farmers and members of the BPP (Agricultural Extension Center) and the role of social capital in the performance of the BPP (Agricultural Extension Center) in Tombolo Pao District, Gowa Regency. The research method used by the writer is descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the elements of social capital that exist between the farmers and the BPP (Agricultural Extension Center) in Tombolo Pao District have a very high level of trust, a very broad network, and a reciprocal relationship it is very well established, and the norms are very well implemented by all elements of society in Tombolo Pao District. As well as the role of social capital which plays an important role in the process of the performance of the BPP (Agricultural Extension Center) in Tombolo Pao District. With good interactions based on elements of social capital, the UPT Agricultural Extension Center (BPP) Tombolo Pao will find it easier to carry out their work programs.

Keywords: *Social Capital, Role of Social Capital, BPP (Agricultural Extension Center).*

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Umrah Puji Astuty, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 24 Mei 1998 merupakan anak pertama dari pasangan Muh. Umar Kadir dan Ramlah Suyuti dari empat orang bersaudara yaitu Ahmad Fadillah, Muh. Zaim Fadlan, dan Muh. Anwar Falah. Selama hidupnya, penulis telah menempuh beberapa pendidikan formal, yaitu:

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal Makassar Tahun 2003-2004
2. SD Negeri Sudirman IV Makassar Tahun 2004-2010
3. SMP Negeri 5 Makassar Tahun 2010-2013
4. SMA Negeri 17 Makassar Tahun 2013-2016
5. Selanjutnya dinyatakan lulus melalui Jalur Non-Subsidi (JNS) menjadi mahasiswa di Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, Makassar pada tahun 2016 untuk jenjang pendidikan Strata Satu (S1)

Selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin selain mengikuti kegiatan akademik dengan sebaik-baiknya. Penulis bergabung dalam organisasi di lingkup Departemen Sosial Ekonomi Pertanian dan menjadi Badan Pengurus Harian Mahasiswa Peminat Sosial Ekonomi Pertanian (MISEKTA) periode 2018/2019 sebagai Staff Kesekretariatan. Selain itu, penulis juga aktif mengikuti seminar-seminar mulai dari tingkat regional, nasional hingga tingkat internasional.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Al-hamdu lillahi rabbil alamiin puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir di Program Studi Agribisnis, Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, Makassar. Salam dan shalawat tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar, Nabi akhirul zaman, Nabi pembawa rahmat bagi alam semesta, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul **Peran Modal Sosial terhadap Kinerja BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa** dibawah bimbingan bapak **Prof. Dr. Ir. Mujahidin Fahmid, M.T.D** dan bapak **Ir. Tamzil Ibrahim, M.Si**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa meskipun skripsi ini telah disusun dengan usaha yang semaksimal mungkin, namun bukan mustahil bila di dalamnya terdapat berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan demi kesempurnaan skripsi ini dan untuk pembelajaran di masa yang akan datang. Walaupun hanya setetes harapan, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat adanya. Akhir kata semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam pengembangan diri di kemudian hari dan senantiasa menunjukkan jalan yang terbaik untuk kita serta dapat menuntun kita untuk terus bekerja dengan tulus. *Aamiin*.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Februari 2021

Umrah Puji Astuty

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil alamiin, segala puji syukur penulis hanturkan atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Peran Modal Sosial terhadap Kinerja BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.**

Pada kesempatan yang mulia ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu semasa penulis berjuang menuntut ilmu di kampus khususnya pihak yang membantu untuk kelancaran penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih setulus hati dan menghanturkan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua penulis Ayahanda terkasih **Muh. Umar Kadir** dan Ibunda tercinta **Ramlah Suyuti** yang telah membesarkan, memotivasi dan memberikan dukungan dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan yang tak ternilai dengan doa-doa yang tak hentinya dipanjatkan untuk anaknya.

Tidak sedikit kendala yang penulis hadapi dalam proses penelitian hingga penyusunan skripsi. Namun, dengan tekad yang kuat serta bantuan dari berbagai pihak, maka kendala tersebut dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan Segala kerendahan hati, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih terdalam dan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Mujahidin Fahmid, M.T.D.** selaku pembimbing dan juga penasehat akademik, terima kasih banyak atas waktu, ilmu, motivasi dan saran mengenai berbagai hal. Meski ditengah kesibukan senantiasa meluangkan waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis memohon maaf yang

sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang membuat kecewa, baik saat perkuliahan maupun selama proses bimbingan dan penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga bapak senantiasa diberkahi dan dilindungi oleh Allah SWT.

2. Bapak **Ir. Tamzil Ibrahim, M.Si.** selaku dosen pembimbing, terima kasih atas waktu dan ilmunya, serta senantiasa membimbing dan memberikan masukan terhadap penulis. Penulis memohon sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang membuat kecewa, kesalahan dan tingkah laku yang kurang berkenan selama ini, baik saat perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini. Semoga bapak senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
3. Bapak **Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, M.S.** dan bapak **Ir. Nurdin Lanuhu, M.P.** selaku penguji yang telah memberikan kritik serta saran guna perbaikan penyusunan tugas akhir ini. Penulis memohon sebesar-besarnya atas kesalahan dan tingkah laku yang kurang berkenan selama ini, baik saat perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini. Semoga bapak senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
4. Ibu **Ni Made Viantika S, S.P., M.Agb.** selaku panitia seminar proposal dan seminar hasil, terima kasih banyak telah memberikan waktunya untuk mengatur jadwal seminar serta petunjuk dalam penyempurnaan tugas akhir ini. Terima kasih juga sudah selalu memberikan waktunya ketika saya bertanya mengenai hal-hal yang kurang atau bahkan tidak saya pahami. Semoga ibu senantiasa diberkahi dan dilindungi oleh Allah SWT.
5. Ibu **Dr. A. Nixia Tenriawaru, S.P., M.Si.,** dan bapak **Ir. Rusli M. Rukka, M.Si.,** selaku Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen Sosial Ekonomi Pertanian yang telah banyak memberikan pengetahuan, mengayomi, dan memberikan teladan selama penulis menempuh pendidikan.

6. Bapak dan ibu dosen, khususnya Program Studi Agribisnis Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, yang telah mengajarkan banyak ilmu dan memberikan dukungan serta teladan yang baik bagi penulis selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh staf dan pegawai Departemen Sosial Ekonomi Pertanian terkhusus **Pak Rusli, Kak Ima, dan Kak Hera** yang telah membantu penulis dalam proses administrasi untuk penyelesaian tugas akhir ini.
8. Seluruh *stakeholder* UPT BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Tombolo Pao serta para petani di **Kecamatan Tombolo Pao** yang menjadi informan, terima kasih telah menerima, membantu, serta mengarahkan penulis dalam melakukan penelitian di lapangan.
9. Untuk **Keluarga Besar Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian 2016 (MASA6ENA)**. Terima kasih banyak untuk semua cerita dan pengalaman, serta segala bantuannya selama kurang lebih 4 tahun ini, segala suka duka yang kita lalui bersama, segala kebersamaan yang telah kita lewati. Semangat untuk mengejar mimpi kita masing-masing dan semoga kelak kita tidak akan saling melupakan. Sekali lagi, terima kasih untuk segalanya.
10. Untuk sahabat tersayang “Boria Geng” **Putri Islamiati, Fildza Audinarahma, Resky Novriyanti, Andi Fadillah , Indah Putri A, Aisyah Putri H, dan Nurul Azizah A**, terima kasih telah banyak membantu dan memberikan masukan serta hiburan kepada penulis. Terima kasih banyak untuk segala bentuk suka duka yang telah kita lalui bersama selama masa perkuliahan dan telah menjadikan hari-hari biasa menjadi terasa lebih istimewa. Terima kasih telah menerima banyak kekurangan dan telah menjadi sahabat serta saudara sejak mahasiswa baru, kalian akan selalu di hati, takkan pernah terlupa dan terganti. *Some people make the world special just by being in it. Thank you for always being there as my bestfriend and see you on top!!!*

11. Untuk **Erwin Saputra** selaku seseorang yang senantiasa memberikan dukungan serta semangat yang tak henti-hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak telah menjadi *partner* terbaik yang selalu mendukung segala hal yang ingin penulis capai. Terima kasih telah bersedia menjadi tempat mengadu segala keluh kesah yang penulis rasakan. *Thanks for being the shoulder I can always depend on.*
12. Untuk sahabat seperjuangan pengurus Bidang Kesekretariatan MISEKTA Periode 2018/2019, **Ainim Paradita, Fitri Anugrah S, dan Siti Nurazizah J** terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan, bantuan, serta pengalaman-pengalaman baru yang dapat dijadikan kenangan sampai kapanpun. *Love u guys!*
13. Untuk *partner* berbagi cerita **Wahyuni Wahid**, terima kasih telah menjadi teman yang sangat memberikan hal-hal positif kepada penulis selama masa perkuliahan. *I love u!*
14. Untuk saudari-saudari **SINCAN Mody, Ipeh, Wulan, Mala, Rahma, Fani, Sulis, Nadira** dan teman-teman lainnya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua cerita barunya dan dukungan serta bantuan yang diberikan selama menyelesaikan skripsi ini.
15. Keluarga besar **Mahasiswa Peminat Sosial Ekonomi Pertanian (MISEKTA), MISEKTAku**, wadah komunikasiku, curahan bakat minatku, terima kasih banyak atas semua dinamika, pengetahuan, dan pengalaman organisasi yang telah diberikan kepada penulis selama menggeluti organisasi ini.
16. Untuk saudara-saudari posko **KKN REGULER BULUKUMBA KECAMATAN UJUNG LOE, Desa Garanta Gelombang 102**. Terima kasih untuk satu bulannya. Saya belajar banyak hal dengan waktu yang dihabiskan selama KKN. Sekali lagi terima kasih banyak.

17. **Kepada semua pihak** yang telah memberikan bantuan yang tak mampu penulis sebutkan satu-persatu.

Dear Me,

You are doing better than you think you are. I'm so proud of you!

Don't give up when you still have something to give.

Nothing is really over until the moment you stop trying.

Demikianlah, semoga segala pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat kelak, *aamiin...*

Makassar, Februari 2021

Umrah Puji Astuty

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SUSUNAN TIM PENGUJI	iii
ABSTRAK	iv
RIWAYAT HIDUP PENULIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penyuluhan dan Penyuluh Pertanian	7
2.2 Kelembagaan Penyuluh Pertanian	10
2.2.1 BPP (Balai Penyuluhan Pertanian)	11
2.3 Peranan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian.....	12
2.4 Perkembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	13
2.5 Peran Modal Sosial.....	15
2.5.1 <i>Sharing Information</i>	16
2.5.2 <i>Coordinating Activities</i>	16
2.5.3 <i>Making Collective Decision</i>	17
2.6 Unsur-Unsur Modal Sosial	17
2.6.1 Kepercayaan (<i>Trust</i>).....	19
2.6.2 Jaringan (<i>Networking</i>).....	21
2.6.3 Hubungan Timbal Balik (<i>Reciprocity</i>).....	24
2.6.4 Norma-Norma Sosial (<i>Norms</i>)	24
2.7 Penelitian Terdahulu	25
2.8 Kerangka Pemikiran	26
III. METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	28
3.3 Informan.....	29
3.3.1 Identitas Informan/Responden.....	30
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.5 Metode Analisis Data	34
3.6 Konsep Operasional	36

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
4.1 Letak Geografis dan Administrasi.....	39
4.2 Keadaan Penduduk	39
4.2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	39
4.2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	41
4.2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	42
4.2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	43
4.3 Sarana dan Prasarana	44
4.4 Pola Penggunaan Lahan.....	46
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	47
5.1 Gambaran Umum Program BPP	47
5.1.1 Program Kerja atau Tugas BPP (Balai Penyuluhan Pertanian).....	48
5.1.2 Struktur Pengurus BPP (Balai Penyuluhan Pertanian)	49
5.2 Modal Sosial.....	49
5.2.1 Kepercayaan (<i>Trust</i>).....	51
5.2.2 Jaringan Sosial (<i>Social Networking</i>).....	77
5.2.3 Hubungan Timbal Balik (<i>Reciprocity</i>).....	101
5.2.4 Norma-Norma Sosial (<i>Norms</i>)	113
5.3 Peran Modal Sosial.....	115
5.3.1 <i>Sharing Information</i>	115
5.3.2 <i>Coordinating Activities</i>	116
5.3.3 <i>Making Collective Decision</i>	117
5.4 Kinerja BPP (Balai Penyuluhan Pertanian)	118
5.4.1 Realisasi	119
5.4.2 Perencanaan.....	121
VI. PENUTUP	123
6.1 Kesimpulan	123
6.2 Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Identitas Pengurus UPT BPP (Balai Penyuluh Pertanian) di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 2020.	31
Tabel 2.	Identitas Pengurus Kelompok Tani di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 2020.	32
Tabel 3.	Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 2019.	40
Tabel 4.	Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 2019.	41
Tabel 5.	Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 2019.	42
Tabel 6.	Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 2019.	44
Tabel 7.	Jenis Sarana dan Prasarana yang terdapat di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 2019.	45
Tabel 8.	Pola Penggunaan Lahan di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 2019.	46
Tabel 9.	Daftar Program Pemerintah Terealisasi Oleh BPP (Balai penyuluhan Pertanian) Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, 2019.	119
Tabel 10.	Daftar Program Perencanaan Pemerintah Oleh BPP (Balai penyuluhan Pertanian) Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, 2020.	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kerangka Pemikiran Peran Modal Sosial terhadap Kinerja BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.	27
Gambar 2.	Analisis Data Model Aliran	36
Gambar 3.	Struktur Pengurus BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Kecamatan Tombolo Pao.	49
Gambar 4.	Kepercayaan dalam interaksi sosial ibu Syahriah di Kecamatan Tombolo Pao.	52
Gambar 5.	Kepercayaan dalam interaksi sosial pak Asri Mahmud di Kecamatan Tombolo Pao.	54
Gambar 6.	Kepercayaan dalam interaksi sosial pak Muhsidin di Kecamatan Tombolo Pao.	56
Gambar 7.	Kepercayaan dalam interaksi sosial pak A. Wahyu Pasiore di Kecamatan Tombolo Pao.	57
Gambar 8.	Kepercayaan dalam interaksi sosial pak Imbar Jaya di Kecamatan Tombolo Pao.	59
Gambar 9.	Kepercayaan dalam interaksi sosial pak Ujang Rahmat di Kecamatan Tombolo Pao.	60
Gambar 10.	Kepercayaan dalam interaksi sosial pak Sugianto di Kecamatan Tombolo Pao.	62
Gambar 11.	Kepercayaan dalam interaksi sosial pak Iwan di Kecamatan Tombolo Pao.	64
Gambar 12.	Kepercayaan dalam interaksi sosial pak Rahmat di Kecamatan Tombolo Pao.	66
Gambar 13.	Kepercayaan dalam interaksi sosial pak Sukrianto di Kecamatan Tombolo Pao.	68
Gambar 14.	Kepercayaan dalam interaksi sosial Arfah di Kecamatan Tombolo Pao.	70
Gambar 15.	Kepercayaan dalam interaksi sosial pak Abd. Hafid di Kecamatan Tombolo Pao.	72
Gambar 16.	Kepercayaan dalam interaksi sosial pak Sanusi di Kecamatan Tombolo Pao.	74
Gambar 17.	Kepercayaan dalam interaksi sosial pak M. Saleh di Kecamatan Tombolo Pao.	76
Gambar 18.	Jaringan Sosial dalam interaksi sosial Ibu Syahriah di Kecamatan Tombolo Pao.	78
Gambar 19.	Jaringan Sosial dalam interaksi sosial bapak Asri Mahmud di Kecamatan Tombolo Pao.	80
Gambar 20.	Jaringan Sosial dalam interaksi sosial bapak Muhsidin di Kecamatan Tombolo Pao.	82
Gambar 21.	Jaringan Sosial dalam interaksi sosial bapak A. Wahyu Pasiore di Kecamatan Tombolo Pao.	84
Gambar 22.	Jaringan Sosial dalam interaksi sosial bapak Imbar Jaya di Kecamatan Tombolo Pao.	85
Gambar 23.	Jaringan Sosial dalam interaksi sosial bapak Ujang Rahmat di Kecamatan Tombolo Pao.	87

Gambar 24.	Jaringan Sosial dalam interaksi sosial bapak Sugianto di Kecamatan Tombolo Pao.	88
Gambar 25.	Jaringan Sosial dalam interaksi sosial bapak Iwan di Kecamatan Tombolo Pao.	90
Gambar 26.	Jaringan Sosial dalam interaksi sosial bapak Rahmat di Kecamatan Tombolo Pao.	91
Gambar 27.	Jaringan Sosial dalam interaksi sosial bapak Sukrianto di Kecamatan Tombolo Pao.	93
Gambar 28.	Jaringan Sosial dalam interaksi sosial Arfah di Kecamatan Tombolo Pao.	95
Gambar 29.	Jaringan Sosial dalam interaksi sosial bapak Abd. Hafid di Kecamatan Tombolo Pao.	97
Gambar 30.	Jaringan Sosial dalam interaksi sosial bapak Sanusi di Kecamatan Tombolo Pao.	98
Gambar 31.	Jaringan Sosial dalam interaksi sosial bapak M. Saleh di Kecamatan Tombolo Pao.	100

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Foto Responden

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor primer yang mendominasi aktivitas perekonomian di Indonesia. Luasnya lahan pertanian dengan tanah yang subur membuat banyak masyarakat yang berprofesi sebagai seorang petani. Namun, taraf hidup sebagian petani di Indonesia belum maksimal. Oleh karena itu, Peranan Dinas Pertanian sangat besar dalam mensejahterakan para petani di pelosok-pelosok desa maupun di kelurahan. Disisi lain, pertanian menjadi pusat perhatian pemerintah sebagai cara untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan. Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika para masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan suatu bentuk ketidaksejahteraan yang menggambarkan suatu kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi (Irhamyah, 2017:2).

Lembaga penyuluhan pertanian mempunyai peran strategis untuk pembangunan pertanian di Indonesia karena mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan non formal bagi petani/nelayan serta mendampingi petani, mengajarkan pengetahuan dan keterampilan tentang usahatani, mendidik petani agar mampu memberdayakan semua potensinya, menyebarkan inovasi-inovasi baru kepada petani tentang bagaimana berusahatani dengan baik. Upaya ini sudah mulai dirintis dari tahun 1962 melalui program bimbingan massal (BIMAS). Penyuluhan pertanian dilakukan melalui pendekatan sentralistik dan koordinasi yang ketat antar instansi terkait dari pusat sampai ke daerah. Berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan berlakunya otonomi daerah, maka pada zaman ini paradigma pembangunan pertanian telah bergeser dari

pendekatan sentralistik menjadi desentralistik. Fungsi penyuluhan pertanian di beberapa provinsi dilaksanakan oleh dinas atau badan lingkup pertanian.

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai salah satu kelembagaan penyuluhan yang berkedudukan di tingkat kecamatan merupakan titik sentral dalam struktur organisasi penyuluhan, karena selain menerima pelimpahan tugas dan menerjemahkan kebijakan dari struktur atas, juga dituntut harus mampu memahami permasalahan dan mengakomodir aspirasi petani dan menyelenggarakan penyuluhan di wilayah kerjanya. Cakupan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian, meliputi : 1) Penyusunan program penyuluhan pada tingkat kecamatan; 2) Pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan; 3) Penyediaan dan penyebaran informasi teknologi; 4) Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha; 5) Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh; dan 6) Pelaksanaan proses pembelajaran. Fungsi itu sangat tergantung pada kemampuan organisasi mengaktualisasikan kinerjanya yang digambarkan melalui program aksi yang terdiri dari pengembangan program serta implementasinya yang menjadi pedoman dan arah dalam menyediakan sumber daya, mendukung penyuluh pertanian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Jamil dkk, 2015:2)

Modal sosial dapat didefinisikan sebagai serangkaian nilai dan norma yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjadinya kerjasama diantara mereka (Fukuyama, 2002:12). Kegiatan penyuluhan pertanian dapat berhasil jika penyuluh dapat bekerjasama dengan petani secara kolektif untuk belajar dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman di bidang pertanian, sehingga modal sosial yang ada di masyarakat memiliki peranan demi keberhasilan kegiatan penyuluhan tersebut.

Unsur utama dalam modal sosial adalah *trust* (kepercayaan), *reciprocity* (hubungan timbal balik), *networking* (jaringan sosial) dan *norms* (norma-norma). Kepercayaan (*trust*) didefinisikan sebagai kesediaan (*willingness*) individu untuk menggantungkan dirinya pada

pihak lain yang terlibat dalam pertukaran karena individu mempunyai keyakinan (*confidence*) kepada pihak lain. Secara sederhana resiprositas adalah pertukaran timbal balik antar individu atau antar kelompok. *Reciprocity* (hubungan timbal balik), dapat dijumpai dalam bentuk memberi, saling menerima dan saling membantu yang dapat muncul dari interaksi sosial. Jaringan sosial yakni sekelompok orang yang dihubungkan oleh perasaan simpati dan kewajiban serta oleh norma pertukaran dan *civic engagement*. Jaringan ini bisa dibentuk karena berasal dari daerah yang sama, kesamaan kepercayaan politik atau agama, hubungan genealogis, dan lain-lain. Jaringan sosial tersebut diorganisasikan menjadi sebuah institusi yang memberikan perlakuan khusus terhadap mereka yang dibentuk oleh jaringan untuk mendapatkan modal sosial dari jaringan tersebut. Norma adalah aturan-aturan yang dibuat dengan harapan bisa ditaati dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu kelompok sosial tertentu (Sari, 2018:9). Keempat unsur tersebut sangat berperan penting dalam kegiatan penyuluhan pertanian yang dilakukan karena setiap penyuluhan yang baik dapat tercipta karena adanya komunikasi yang baik antara penyuluh dan penerima.

Peran modal sosial terdiri dari tiga antara lain *Sharing Information, Coordinating Activities, Making Collective Decision*. *Sharing Information* atau berbagi informasi yaitu tindakan setiap individu dalam menyampaikan informasi yang tepat untuk membuat keputusan yang efektif dan efisien. *Coordinating Activities* yaitu dimana setiap individu mengkoordinasikan segala aktivitas atau pekerjaan yang akan atau sedang dijalani agar lebih memudahkan dalam melaksanakan tindakan dan pengambilan keputusan. *Making Collective Decision* yaitu dimana setiap individu akan membuat keputusan secara bersama-sama.

Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 desa/kelurahan dengan luas sekitar 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe,

Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang 90 km (BPS Gowa dalam Angka, 2019).

Di Kecamatan Tombolo Pao terdapat 1 unit UPT BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) yang bertugas untuk memberikan penyuluhan pertanian kepada para petani di wilayah sekitar. UPT BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) tersebut merupakan BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) yang menaungi 3 Kecamatan di Kabupaten Gowa, antara lain Kecamatan Tombolo Pao, Kecamatan Tinggi Moncong, dan Kecamatan Parigi. Namun pada UPT BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) tersebut hanya memiliki 9 orang penyuluh yang masing-masing Kecamatan ditugaskan 3 orang penyuluh. Sedangkan di Kecamatan Tombolo Pao terdapat 221 Kelompok Tani yang terdaftar di SK Bupati dan hal ini dapat membuat pengurus BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) dan penyuluh kewalahan dalam melaksanakan program kerja BPP. Maka, untuk mengetahui hubungan antara petani dengan anggota pengurus BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) terjalin dengan baik dapat diketahui melalui unsur-unsur modal sosial yang terjalin antaranya yaitu; Kepercayaan (*trust*), Jaringan Sosial (*social networking*), Hubungan Timbal Balik (*reciprocity*), dan Norma-Norma (*norms*). Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Modal Sosial terhadap kinerja BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana unsur-unsur modal sosial yang terjalin antara petani dengan anggota/pengurus BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa ?
2. Bagaimana peran modal sosial terhadap kinerja anggota/pengurus BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan permasalahan di atas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui unsur-unsur modal sosial yang terjalin antara petani dengan anggota/pengurus BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui peran modal sosial terhadap kinerja BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama proses perkuliahan dan sebagai syarat kelulusan.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan untuk dianalisis lebih lanjut.
3. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk melihat peran modal sosial terhadap kinerja anggota/pengurus lembaga penyuluhan dalam penelitian ini yaitu BPP (Balai Penyuluhan Pertanian).
4. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai peran modal sosial terhadap

kinerja anggota/pengurus lembaga penyuluhan dalam penelitian ini yaitu BPP (Balai Penyuluhan Pertanian).

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyuluhan dan Penyuluh Pertanian

Ilmu penyuluhan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana pola perilaku manusia dibentuk, bagaimana perilaku manusia dapat berubah atau diubah, sehingga membawa pada perubahan kualitas kehidupan orang yang bersangkutan. Sebagai suatu disiplin ilmu, penyuluhan memulai proses perkembangannya dengan meminjam dan merangkum konsep-konsep ilmiah dari berbagai disiplin ilmu lain yang relevan, seperti ilmu pendidikan, psikologi, antropologi, sosiologi, psikologi sosial dan manajemen (El Syabrina, 2013:36).

Penyuluhan selalu menitik-beratkan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia, lahir dan batin, sehingga kegiatan yang dilakukan akan selalu berkaitan erat dengan ilmu-ilmu lain seperti pertanian, kesehatan dan ilmu-ilmu kesejahteraan sosial lainnya. Jadi sebagai ilmu, penyuluhan bersifat interdisipliner. Hal ini berkaitan erat dengan praktik penyuluhan di lapangan yang menuntut pendekatan interdisipliner. Kenyataan menunjukkan bahwa beberapa keberhasilan pembangunan pertanian di Indonesia terjadi karena ditopang oleh penggunaan pendekatan interdisipliner ilmu-ilmu pertanian, ekonomi, sosiologi dan komunikasi seperti yang terangkum dalam ilmu penyuluhan (El Syabrina, 2013:36).

Menurut El Syabrina (2013:36) mengemukakan bahwa penyuluhan sebagai proses pendidikan maka penyuluh harus dapat membawa perubahan manusia dalam hal aspek-aspek perilaku baik pengetahuan maupun keterampilannya. Penyuluhan sebagai proses demokrasi, maka penyuluhan harus mampu mengembangkan suasana bebas untuk mengembangkan kemampuan masyarakat. Penyuluh harus mampu mengajak sasaran penyuluhan berpikir, berdiskusi, menyelesaikan masalahnya, merencanakan dan bertindak bersama-sama dibawah bimbingan orang-orang di antara mereka. Sebagai proses yang kontinu, penyuluhan harus

dimulai dari keadaan petani pada waktu itu kearah tujuan yang mereka kehendaki berdasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan yang senantiasa berkembang yang dirasakan oleh sasaran penyuluhan. Bila penyuluh melihat adanya kebutuhan, tetapi kebutuhan itu belum dirasakan oleh sasaran penyuluhan, padahal kebutuhan tersebut dinilai sangat vital dan mendesak, maka penyuluh perlu berusaha terlebih dahulu untuk menyadarkan sasaran akan kebutuhan tersebut (*unfelt need*) menjadi kebutuhan yang dirasakan oleh sasaran (*felt need*).

Mardikanto (1991) dalam El Syabrina (2013:36) menyatakan bahwa penyuluhan pertanian adalah suatu sistem pendidikan bagi masyarakat (petani) untuk membuat mereka tahu, mau dan mampu berswadaya melaksanakan upaya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakatnya. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada dasarnya mempunyai keluaran (*output*) yang tidak sama pada berbagai tingkat, yaitu Lapangan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat serta untuk berbagai kategori petani nelayan. Misi pokok penyuluhan pertanian adalah pengembangan sumber daya manusia dan ahli teknologi. Sedangkan keberhasilan suatu kegiatan penyuluhan dapat diukur dari seberapa jauh telah terjadi perubahan perilaku (petani) sarasannya, baik menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Menurut UU No. 16/2006, penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan. Lebih lanjut, penyuluh dipilah menjadi tiga kategori, yaitu penyuluh PNS, Swasta, dan Swadaya. Menurut Hafsah (2006) dalam El Syabrina (2013:36-37) mengemukakan bahwa efektivitas penyuluhan pertanian akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh lembaga penyuluhan diperhatikan oleh subsistem yang lain, atau mampu mengembangkan dirinya menjadi suatu kegiatan strategis. Dalam banyak hal kasus, terlihat bahwa keberhasilan penyuluhan pertanian sangat ditentukan oleh perhatian pengusaha atau pimpinan wilayah setempat.

Dalam menyampaikan informasi kepada sasaran, penyuluh hendaknya mampu melaksanakan proses belajar mengajar, selain sebagai seorang guru, hendaknya menempatkan diri sebagai teman sasaran dalam mengambil keputusan. Dalam kaitan ini penyuluh dituntut mampu berperan ganda, antara lain dengan menjalankan fungsi sebagai komunikator, pendidik dan motivator, bagi terjadinya perubahan perilaku sasaran, karena penyuluh mengkomunikasikan pesan-pesan penyuluhan kepada sasaran, dengan metode yang syarat nilai pendidikan, sehingga bertindak sebagai pendidik dengan berperan sebagai motivator bagi peningkatan kesadaran masyarakat kearah pencapaian tujuan yang diinginkan, dengan melaksanakan tugas-tugas tertentu. Selain itu, penyuluh juga harus mampu melakukan pengamatan terhadap keadaan sumber daya yang terdapat di pedesaan, memberikan contoh pemecahan masalah dari berbagai kebutuhan pokok yang dihadapi masyarakat, serta menganalisa pemecahan masalah tersebut (Departemen Pertanian, 2002).

Kegiatan penyuluhan akan menjadi kegiatan yang mendapat apresiasi petani bila sang penyuluh dapat memberikan informasi-informasi segar dan bermanfaat serta memberikan pencerahan dalam setiap *problem* usahatani yang dilakukan oleh para petani sebagai sasaran dari penyuluhannya. Standarisasi kualitas sumber daya manusia seorang penyuluh pertanian mutlak menjadi *main point* dalam perekrutan dan penempatan PPL di lapangan. Terampil memahami masalah, mengetahui kebutuhan, dan dapat memberikan solusi pada setiap permasalahan yang dialami dan ditemui oleh petani merupakan kebutuhan ideal yang harus dapat distandarkan bagi setiap PPL di lapangan (El Syabrina, 2013:37).

Menurut Hafsah (2006) dalam El Syabrina (2013:37), perubahan yang paling mendasar pada penyuluhan paradigma baru adalah perubahan pengambilan keputusan sentralisasi menjadi desentralisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program penyuluhan sebagai konsekuensi dari konsep penyuluhan desentralisasi.

2.2 Kelembagaan Penyuluh Pertanian

Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2006, Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan terdiri atas: a) kelembagaan penyuluhan pemerintah, b) kelembagaan penyuluhan swasta, c) kelembagaan penyuluhan swadaya. Kelembagaan penyuluhan pemerintah terdiri atas: a) pada tingkat Pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan, b) pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan, c) pada tingkat kabupaten/kota berbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan, d) pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan.

Kelembagaan Penyuluhan di tingkat pusat bertanggung jawab kepada menteri, untuk melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan optimalisasi kinerja penyuluhan pada tingkat pusat, diperlukan wadah koordinasi penyuluhan nasional non struktural yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden. Kelembagaan penyuluhan di tingkat provinsi disebut dengan Badan Koordinasi Penyuluhan, yang berkedudukan di provinsi. Memiliki tugas untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi, gubernur dibantu oleh Komisi Penyuluhan provinsi. Komisi Penyuluhan provinsi bertugas memberikan masukan kepada gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi (UU No.16 tahun 2006).

Kelembagaan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota disebut Badan Pelaksana Penyuluhan. Badan Pelaksana Penyuluhan di tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota, yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota, dalam menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan kabupaten/kota, bupati dibantu oleh Komisi Penyuluhan kabupaten/kota. Komisi Penyuluhan kabupaten/kota mempunyai tugas memberikan masukan kepada

bupati/walikota sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan kabupaten/kota (UU No.16 tahun 2006).

Kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan disebut Balai Penyuluhan. Balai Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha. Balai Penyuluhan bertanggung jawab kepada Badan Pelaksana Penyuluhan kabupaten/kota yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota (UU No.16 tahun 2006).

2.2.1 BPP (Balai Penyuluhan Pertanian)

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai salah satu kelembagaan penyuluhan yang berkedudukan di tingkat kecamatan merupakan titik sentral dalam struktur organisasi penyuluhan, karena selain menerima pelimpahan tugas dan menerjemahkan kebijakan dari struktur atas, juga dituntut harus mampu memahami permasalahan dan mengakomodir aspirasi petani dan menyelenggarakan penyuluhan di wilayah kerjanya. Cakupan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian, meliputi : 1) Penyusunan program penyuluhan pada tingkat kecamatan; 2) Pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan; 3) Penyediaan dan penyebaran informasi teknologi; 4) Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha; 5) Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh; dan 6) Pelaksanaan proses pembelajaran. Fungsi itu sangat tergantung pada kemampuan organisasi mengaktualisasikan kinerjanya yang digambarkan melalui program aksi yang terdiri dari pengembangan program serta implementasinya yang menjadi pedoman dan arah dalam menyediakan sumber daya, mendukung penyuluh pertanian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Jamil dkk, 2015:2)

BPP sebagai wadah bagi para penyuluh pertanian untuk berinteraksi dan memanfaatkan segala sumberdaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya menuntut kelembagaan ini dapat memfasilitasi serta menyediakan sarana dan prasarana untuk

penyelenggaraan proses penyuluhan secara memadai sesuai dengan dinamika penyelenggaraan penyuluhan pada wilayah kerja masing-masing. Kelemahan faktor internal yang menyebabkan ketidakmampuan BPP memfasilitasi serta menyediakan sarana dan prasarana akan menimbulkan persoalan yang dapat menyebabkan lemahnya perumusan program aksi dan pada akhirnya akan mempengaruhi rendahnya kinerja BPP. Akibatnya, selain tujuan organisasi tidak tercapai, pelaksanaan penyuluhan di lapangan kurang efektif. Dampaknya dapat dilihat dari perencanaan penyuluhan tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan petani sebagai sasaran sehingga proses pembelajaran tidak berjalan optimal karena petani hanya menjadi bagian dari keinginan penyuluh. Dampak lainnya adalah perilaku petani yang rendah, ditandai dengan pengelolaan usahatani yang tidak sesuai anjuran serta rendahnya tingkat partisipasi dalam pelaksanaan penyuluhan (Jamil dkk, 2015:2).

2.3 Peranan Kelembagaan Penyuluh Pertanian

Peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : (1). Berperan sebagai, (2). Melakukan tindakan atau bertindak dengan giat, (3). Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan adalah suatu kompleks harapan manusia terhadap individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut (Irhamyah, 2017:13).

Teori peran (*role theory*) mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut (Irhamyah, 2017:13).

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *function*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi (Irhamisyah, 2017:13-14).

2.4 Perkembangan Kelembagaan Penyuluh Pertanian

Perubahan sistem pemerintahan dari paradigma yang berorientasi pada sentralisasi ke desentralisasi, telah memberikan konsekuensi sangat luas dan mendalam pada sistem tata pemerintahan daerah di Indonesia. Perubahan tersebut dapat dilihat dari bergesernya status dan kedudukan suatu kelembagaan dalam keseluruhan formasi tata pemerintahan daerah. Konsekuensi dari perubahan tersebut adalah pada batasan kekuasaan dan wewenang suatu kelembagaan dalam mengimplementasikan proses-proses regulasi, legislasi dan kebijakan publik (El Syabrina, 2013:34).

Nasdian (2008) dalam El Syabrina (2013:34-35) mengungkapkan bahwa sejak berorientasi pada paradigma desentralisasi, formasi sosial dalam sistem tata pemerintahan di daerah telah membentuk pola-pola relasi kekuasaan dan wewenang yang berbasis tidak hanya pada pilar *regulative*, tetapi juga telah mempertimbangkan pilar *normative* dan *cultural-cognitive* yang berbasis otonomi lokal. Hafsa (2006) dalam El Syabrina (2013:35) mengungkapkan bahwa pembentukan kelembagaan dalam masyarakat tidak terlepas dari peranan individu, kelompok atau pemerintah sehingga lembaga-lembaga yang hidup dalam

masyarakat yang ada bersifat informal dan ada pula yang tercipta secara formal baik dari masyarakat maupun luar masyarakat. Pergeseran paradigma penyuluhan dari teknik budidaya (*on-farm*) menuju sistem usaha agribisnis telah mengubah sistem kelembagaan penyuluhan, dari pendekatan agribisnis dan partisipatif yang tadinya hanya terdiri dari subsistem petani, penyuluh dan kelembagaan struktural, menjadi subsistem petani, penyuluh, pelaku agribisnis lainnya, lembaga penelitian dan lembaga pelatihan.

Kelembagaan penyuluhan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sepanjang hal itu memungkinkan adanya pembagian kerja yang lebih jauh, peningkatan pendapatan, perluasan usaha dan kebebasan untuk memperoleh peluang usaha. Dalam kehidupan nyata, kelembagaan dapat menjadi peubah eksogen dalam proses pembangunan dengan demikian kelembagaan dapat dianggap sebagai penyebab segala perubahan pembangunan. Namun dipihak lain kelembagaan bisa diduga menjadi peubah endogen dimana perubahan kelembagaan diakibatkan karena adanya perubahan-perubahan pada sistem sosial masyarakat yang ada (El Syabrina, 2013:35).

Menurut Scott (2008) dalam El Syabrina (2013:35) mengungkapkan perubahan kelembagaan secara teoritis tidak hanya disebabkan oleh faktor regulasi, namun juga oleh struktur sosial masyarakat yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempercepat atau memperlambat (atau menjadi *buffer*) evolusi bersama kelembagaan dan organisasi tersebut. Pada era BIMAS, penyuluhan pertanian dilakukan melalui pendekatan sentralistis dan berkoordinasi yang ketat antar instansi terkait dari pusat sampai ke daerah. Sedangkan konsep penyuluhan di era otonomi diserahkan sepenuhnya ke kabupaten/kota. Pemerintah pusat sepenuhnya hanya bertugas merumuskan kebijakan, norma, standar, dan model-model penyuluhan partisipatif (RPP IPB, 2005). Namun, munculnya beberapa peraturan pemerintah yang kurang mendukung penyelenggaraan penyuluhan daerah, seperti PP No.25/2000 dan PP No.8/2003 mengakibatkan ruang gerak pemerintah daerah untuk mendirikan kelembagaan

penyuluhan pertanian sangat terbatas. Tentunya hal ini menyebabkan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi tidak jelas dan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota beragam.

Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyatakan pembagian kelembagaan penyuluhan, yaitu: 1) Kelembagaan di Pusat adalah Badan Penyuluhan yang bertanggung jawab kepada menteri; 2) Kelembagaan di provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan; 3) Kelembagaan di kabupaten/kota berbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan; 4) Kelembagaan di Kecamatan adalah Balai Penyuluh Pertanian (BPP); serta 5) Kelembagaan di desa/kelurahan berbentuk pos penyuluhan desa/kelurahan yang bersifat non struktural.

Hafsah (2006) dalam El Syabrina (2013:35) mengemukakan bahwa kebijakan pembangunan pertanian pada era desentralisasi adalah mewujudkan pertanian yang tangguh dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani. Kebijakan ini juga mensyaratkan dikembangkannya jaringan kerjasama diantara pelaku agribisnis, penyuluhan pertanian, peneliti, pendidikan dan pelatihan.

Slamet (2008) dalam El Syabrina (2013:24-25) mengemukakan bahwa terdapat dua hal penting yang perlu dipikirkan dan dilaksanakan dengan baik agar penyuluhan dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan dimasa depan dapat berjalan dengan efektif secara berkelanjutan, yaitu dibangunnya sistem penyuluhan yang komprehensif dan diadopsinya pengembangan program-program penyuluhan yang berbasis penelitian dan ilmu pengetahuan.

2.5 Peran Modal Sosial

Menurut Ngangi dalam Rumagit et al (2019) sektor pembangunan ekonomi, modal sosial mempunyai pengaruh yang sangat tinggi terhadap perkembangan dan kemajuan berbagai sektor ekonomi salah satunya adalah melalui pertanian. Hal ini dikarenakan petani

harus memiliki modal sosial yang kuat agar bisa mencapai apa yang dijadikan tujuan dalam berusahatani, terdapat 3 peranan modal sosial antara lain; *sharing information*, *coordinating activities*, dan *making collective decision*.

2.5.1 *Sharing Information*

Sharing information atau berbagi informasi yaitu tindakan setiap individu dalam menyampaikan informasi yang tepat untuk membuat keputusan yang efektif dan efisien. Berbagi informasi adalah kunci untuk menghasilkan hubungan komunikasi yang baik dan sukses. Ketika seseorang memiliki komitmen untuk saling berbagi informasi, maka hubungan internal mereka akan terjalin dengan baik. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Fawcett (2007) dalam Mandasari N (2016:3) bahwa hubungan yang dekat dan berkualitas dapat dibangun melalui berbagi informasi ketika perusahaan ingin berbagi tujuan bersama dan membangun karyawan yang aktif (hubungan kolaborasi yang baik). Jadi untuk menjalin hubungan antar karyawan diperlukan komunikasi yang terbuka, di mana komunikasi yang terbuka disebabkan oleh adanya aliran informasi yang tepat dalam organisasi.

Miguel dan Brito (2011) dalam Mandasari N (2016:3) mengungkapkan bahwa *Sharing Information* (pembagian informasi) adalah aliran komunikasi secara terus menerus antara mitra kerja baik formal maupun informal dan berkontribusi untuk suatu perencanaan serta pengawasan yang lebih baik dalam sebuah rangkaian.

2.5.2 *Coordinating Activities*

Miguel dan Brito (2011) dalam Mandasari N (2016:4) mengungkapkan bahwa *Coordinating activities* yaitu dimana setiap individu mengkoordinasikan segala aktivitas atau pekerjaan yang akan atau sedang dijalani agar lebih memudahkan dalam melaksanakan tindakan dan pengambilan keputusan. Koordinasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan dalam rangka pengintegrasian dan penyesuaian tujuan dan rencana kerja yang telah ditetapkan pada semua unsur, bidang fungsional dan departemen untuk menghasilkan suatu

tindakan yang seragam dan harmonis secara efektif dan efisien. Dalam sebuah organisasi koordinasi harus diberikan oleh atasan dalam menyelesaikan tugas sehingga penyampaian informasi menjadi jelas dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan sesuai dengan wewenang yang diterima.

2.5.3 *Making collective decision*

Miguel dan Brito (2011) dalam Mandasari N (2016:5) mengungkapkan bahwa *Making collective decision* yaitu dimana setiap individu akan membuat keputusan secara bersama-sama. Kita selalu berada dalam situasi yang menuntut kita untuk membuat pilihan dan merumuskan rencana. Bila suatu keputusan bisa dibuat seorang diri, mungkin prosesnya relatif lebih sederhana. Tetapi, bila keputusan harus dibuat dengan orang lain, masalahnya menjadi jauh berbeda. Meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama, keputusan bersama/kelompok/tim lebih bisa menggabungkan sejumlah besar data dan pengalaman (yang baik maupun yang buruk), serta beragam pendapat. Kajian yang ada selama ini menunjukkan bahwa orang yang berpartisipasi dalam pembuatan keputusan kelompok akan lebih besar kemungkinannya untuk mengimplementasikannya.

2.6 Unsur-Unsur Modal Sosial

Modal sosial merupakan suatu cara untuk membangun hubungan dengan sesama dan menjaganya agar terus berlangsung sepanjang waktu, orang mampu bekerja bersama-sama untuk mencapai berbagai hal yang tidak dapat mereka lakukan sendirian. Orang berhubungan melalui serangkaian jaringan dan mereka cenderung memiliki kesamaan nilai dengan anggota lain dalam jaringan tersebut, sejauh jaringan tersebut menjadi sumber daya, hal tersebut dapat dipandang sebagai modal. Menurut Pierre Bourdieu, modal sosial adalah jumlah sumber daya, aktual atau maya yang berkumpul pada seorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik perkenalan dan pengakuan yang sedikit banyak terintitusalisasikan. Bourdie juga menjelaskan bahwa modal sosial dapat

bertahan nilainya, individu harus mengupayakannya. Pokok perhatian Bourdie tentang modal sosial dahulu dan sekarang adalah pemahaman atas hierarki sosial.

Supriono (2008) dalam Budi dan Ardian (2012:133) menyatakan modal sosial merupakan hubungan hubungan yang tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat dalam spektrum yang luas, yaitu sebagai perekat sosial yang menjaga kesatuan anggota masyarakat secara bersama-sama.

Modal sosial dibutuhkan guna menciptakan jenis komunitas moral yang tidak bisa diperoleh seperti dalam kasus bentuk-bentuk *human capital*. Akuisisi modal sosial memerlukan pembiasaan terhadap norma-norma moral sebuah komunitas masyarakat dan dalam konteksnya sekaligus mengadopsi kebajikan-kebajikan seperti kesetiaan, kejujuran, dan keteguhan hati (*dependability*). Modal sosial lebih didasarkan pada kebajikan-kebajikan sosial umum, dimana merupakan tempat meleburnya kepercayaan dan faktor yang penting bagi kesehatan ekonomi sebuah negara, yang bersandar pada akar-akar kultural. Kondisi modal sosial di daerah pedesaan berbeda dengan modal sosial di daerah perkotaan. Perbedaan tersebut dicirikan dengan masyarakat pedesaan yang sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan berbeda dengan masyarakat perkotaan yang pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain (Soekanto, 2013:57).

Putnam (2000) dalam Kholifa (2016:13) menyatakan di dalam kelompok masyarakat tentunya ada norma-norma berlaku yang menjaga hubungan sosial antar anggota kelompok atau sesama anggota masyarakat. Dengan banyaknya seseorang ikut dalam berbagai macam partisipasi maka akan semakin mudah mendapatkan akses informasi, yang mana informasi akan lebih mudah didapatkan apabila memiliki jaringan yang banyak. Putnam (2000) dalam Kholifa (2016:12) menyatakan modal sosial diukur atas dasar (1) *generalized trust*, (2) *norms*, (3) *reciprocity*, dan (4) *networks*.

2.6.1 Kepercayaan (*Trust*)

Grootaert, dkk (2004) dalam Kholifa (2016:15) menyebutkan rasa percaya merupakan input modal sosial karena adanya rasa saling percaya antar individu menjadi landasan terjalannya interaksi sosial yang mengarah kepada hubungan sosial yang lebih erat antar anggota masyarakat. Di sisi lain, kuantitas dan kualitas interaksi sosial seperti lamanya hubungan sosial yang telah terjalin akan meningkatkan rasa percaya antar individu.

Kepercayaan (*Trust*) dapat mendorong seseorang untuk bekerjasama dengan orang lain untuk memunculkan aktivitas ataupun tindakan bersama yang produktif. *Trust* merupakan produk dari norma-norma *social cooperation* yang sangat penting yang kemudian memunculkan modal sosial. Fukuyama (2002:12), menyebutkan *trust* sebagai harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama anggota komunitas-komunitas itu. *Trust* bermanfaat bagi pencipta ekonomi tunggal karena bisa diandalkan untuk mengurangi biaya (*cost*), hal ini melihat dimana dengan adanya *trust* tercipta kesediaan seseorang untuk menempatkan kepentingan kelompok diatas kepentingan individu. Adanya *high-trust* akan terlahir solidaritas kuat yang mampu membuat masing-masing individu bersedia mengikuti aturan, sehingga ikut memperkuat rasa kebersamaan. Bagi masyarakat *low-trust* dianggap lebih inferior dalam perilaku ekonomi kolektifnya. Jika *low-trust* terjadi dalam suatu masyarakat, maka campur tangan negara perlu dilakukan guna memberikan bimbingan (Fukuyama, 2002:13).

Menurut Robert Lawang (2004:36) kepercayaan merupakan “hubungan antara dua belah pihak atau lebih yang mengandung harapan yang menguntungkan salah satu pihak atau kedua belah pihak melalui interaksi sosial”. Fukuyama sendiri mengklaim bahwa kepercayaan adalah dasar dari tatanan sosial, komunitas tergantung pada kepercayaan timbal balik dan tidak akan muncul secara spontan tanpanya (Field, 2003:102).

Kepercayaan itu dipertahankan oleh norma yang mengikat pihak-pihak yang berinteraksi (Agus Salim, 2008:73). Kepercayaan (*Trust*) merupakan suatu komponen penting ketika seseorang menjalankan suatu usaha/kegiatan produksi. Kepercayaan merupakan hal yang mendasar untuk membentuk dan menjalankan sebuah hubungan (kerjasama).

Nilai-nilai kepercayaan dan daya tanggap di antara anggota akan menimbulkan kerjasama dan solidaritas. Nilai kepercayaan diantara anggota dan keuntungan bersama akan menciptakan jaringan dan kebijakan. Sementara daya tanggap dan keuntungan bersama akan menciptakan persaingan dan keberlangsungan usaha.

Terbentuknya saling percaya menurut Pranadji (2006) dalam Budhi dan Ardian (2012:134) adalah hasil interaksi yang melibatkan anggota masyarakat dalam suatu kelompok ketetangaan, asosiasi tingkat dukuh, organisasi tingkat desa, dan berkembangnya sistem jaringan sosial hingga melintasi batas desa, dan berkembangnya sistem jaringan sosial hingga melintasi batas desa. Pada suatu masyarakat ketetangaan atau dukuh yang mengandung kontradiksi sosial relatif tinggi, maka jaringan kepercayaan yang terbentuk umumnya relatif sempit hingga pada tingkat hubungan yang bersifat personal dan persaudaraan yang lebih banyak diwarnai nilai-nilai primordial atau askriptif.

Tingkat kepercayaan diukur dalam bentuk tingkat keyakinan seseorang terhadap tindakan secara konsisten pada saat terjalinnya hubungan antar individu atau kelompok dalam komunitas. Tingkat kepercayaan merupakan elemen tata nilai yang ada pada masyarakat yang melekat dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi sumber daya sosial (Fauziah, 2015:14).

Setiap orang memiliki keterbatasan dalam memperkirakan sesuatu, untuk mengatasi ketidakpastian tersebut maka dia harus menjalin hubungan kepercayaan dengan orang lain (Damsar, 2011:201). Kepercayaan memperbesar kemampuan manusia untuk bekerjasama, kerjasama tidak mungkin terjalin kalau tidak didasarkan atas adanya saling percaya diantara

sesama pihak yang terlibat. Rasa saling mempercayai antar anggota di dalam suatu kelompok sangat menentukan kerja sama antar anggota yang pada akhirnya akan menentukan hasil dari output suatu kelompok.

Ulinnuha (2012) dalam Kholifa (2016:15) berpendapat bahwa unsur terpenting dalam modal sosial adalah kepercayaan yang merupakan perekat bagi langgengnya kerjasama dalam kelompok masyarakat. Dengan kepercayaan orang-orang akan bisa bekerjasama secara lebih efektif. Harper dan Kelly (2003) dalam Kholifa (2016:16) menyatakan kepercayaan adalah dimensi yang paling dekat berhubungan dengan modal sosial, baik itu sebagai suatu bagian langsung dari modal sosial ataupun sebagai hasil dari modal sosial.

2.6.2 Jaringan (*Networking*)

Salah satu pengertian jaringan yang dikemukakan oleh Robert Lawang (2004:50), jaringan merupakan terjemahan dari *network*, yang berasal dari dua suku kata yaitu *net* dan *work*. *Net* diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai jaring, tenunan seperti jala, terdiri dari banyak ikatan antar simpul yang saling terhubung satu sama lain. Sedangkan kata *work* bermakna sebagai kerja. Gabungan kata *net* dan *work*, sehingga menjadi *network*, yang terletak penekanannya pada kerja bukan jaring, dimengerti sebagai kerja (bekerja) dalam hubungan antar simpul-simpul seperti halnya jaring.

Jaringan dan fungsinya terhadap pencapaian suatu tujuan tidak terlepas dari kepercayaan. Melalui jaringan orang saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, saling membantu dalam melaksanakan atau mengatasi suatu masalah. Jaringan adalah sumber pengetahuan yang menjadi dasar utama dalam pembentukan kepercayaan *strategic*. Media yang paling ampuh untuk membuka jaringan adalah pergaulan dalam pengertian umum dengan membuka diri lewat media cetak atau elektronik dalam pengertian terbatas seperti pergaulan.

Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (atau yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain. Analisis jaringan jejaring sosial memandang hubungan sosial sebagai simpul dan ikatan. Simpul adalah aktor individu di dalam jaringan, sedangkan ikatan adalah hubungan antar aktor tersebut. Penelitian dalam berbagai bidang akademik telah menunjukkan bahwa jaringan jejaring sosial beroperasi pada banyak tingkatan, mulai dari keluarga hingga negara, dan memegang peranan penting dalam menentukan cara memecahkan masalah, menjalankan organisasi, serta derajat keberhasilan seorang individu dalam mencapai tujuannya.

Modal sosial tidak dibangun hanya oleh satu individu, melainkan akan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat. Modal sosial akan kuat tergantung pada kapasitas yang ada di dalam kelompok masyarakat untuk membangun sejumlah asosiasi berikut membangun jaringannya. Salah satu kunci keberhasilan membangun modal sosial terletak pula pada kemampuan sekelompok orang dalam suatu organisasi atau perkumpulan dalam melibatkan diri dalam suatu hubungan jaringan sosial. Ide sentral dari modal sosial adalah bahwa jaringan-jaringan sosial merupakan suatu aset yang bernilai (Field, 2003:18) jaringan menyediakan suatu basis bagi kohesi sosial karena menyanggulkan orang untuk bekerjasama satu sama lain dan bukan hanya dengan orang yang mereka kenal secara langsung agar saling menguntungkan. Dalam hal ini jaringan yang terjadi adalah antara individu petani di daerah tersebut.

Dalam bentuk yang paling sederhana, suatu jaringan jejaring sosial adalah peta semua ikatan yang relevan antar simpul yang dikaji. Jaringan tersebut juga dapat digunakan untuk menentukan modal sosial aktor individu. Konsep ini sering digambarkan dalam diagram jaringan sosial yang mewujudkan simpul sebagai titik dan ikatan sebagai garis

penghubungnya. Pada konsep jaringan ini terdapat unsur kerja yang melalui media hubungan sosial menjadi kerja sama. Hubungan-hubungan yang terjadi bisa dalam bentuk formal maupun bentuk informal. Hubungan sosial adalah gambaran atau cermin dari kerjasama dan koordinasi antar warga yang didasari oleh ikatan sosial yang aktif dan bersifat resiprosikal (Damsar, 2011:205). Melalui jaringan sosial ini, individu akan ikut serta dalam tindakan resiprositas dan melalui hubungan ini diperoleh keuntungan yang saling memberikan apa yang dibutuhkan satu sama lain.

Pada dasarnya jaringan sosial terbentuk karena adanya rasa saling percaya, saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan ataupun mengatasi sesuatu. Pada intinya jaringan dan hubungan sosial ini sangat berarti bagi setiap individu ataupun kelompok organisasi. Karena dari sudut pandang sosiologi, dapat dikatakan bahwa kita, paling tidak sebagian, didefinisikan oleh siapa yang kita kenal. Secara lebih luas, ikatan-ikatan di antara manusia juga menjadi blok bangunan utama dari bangunan sosial yang lebih besar. Gagasan sentral modal sosial adalah bahwa jaringan sosial merupakan aset yang sangat bernilai. Jaringan memberikan dasar bagi kohesi sosial karena mendorong orang bekerja sama satu sama lain dan tidak sekedar dengan orang yang mereka kenal secara langsung untuk memperoleh manfaat timbal balik (Field, 2010:18).

Fukuyama (2002: 234) menjelaskan bahwa jaringan diartikan sebagai sekelompok agen-agen individual yang berbagi norma-norma atau nilai-nilai informal melampaui nilai-nilai atau norma-norma yang penting untuk transaksi-transaksi pasar biasa. Jaringan yang dilihat dari tingkat struktur dapat dipahami sebagai pola suatu hubungan sosial yang meningkatkan atau dapat juga menurunkan perilaku seseorang untuk terlibat di dalam suatu jaringan pada tatanan struktur sosial (Sholihah, 2014: 38).

Jaringan memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai pelicin, dimana jaringan memberikan berbagai kemudahan dalam mengakses berbagai macam kebutuhan maupun sumberdaya yang diperlukan di dalam suatu industri seperti informasi. Jaringan menjadi jembatan manakala di dalam bekerjasama adanya norma yang mengatur setiap orang yang terlibat di dalam kerjasama itu mengikuti aturan sehingga terjadinya rasa kepercayaan di antara orang yang terlibat. Sebagai perekat, jaringan berfungsi memberikan tatanan dan makna pada kehidupan sosial (Damsar, 2009: 160).

2.6.3 Hubungan Timbal Balik (*Reciprocity*)

Modal sosial senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran ini bukanlah sesuatu yang dilakukan secara resiprokal seketika seperti dalam proses jual beli, melainkan suatu kombinasi jangka pendek dan jangka panjang dalam nuansa *altruism* (semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain). Semangat untuk membantu bagi keuntungan orang lain. Imbalannya tidak diharapkan seketika dan tanpa batas waktu tertentu. Pada masyarakat, dan pada kelompok-kelompok sosial yang terbentuk, yang di dalamnya memiliki bobot resiprositas kuat akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Keuntungan lain, masyarakat tersebut akan lebih mudah membangun diri, kelompok, lingkungan sosial, dan fisik secara hebat.

2.6.4 Norma-Norma Sosial (*Norms*)

Norma sosial tidak bisa dipisahkan dari modal sosial, norma sosial yang merupakan komponen dari norma sosial ini memiliki keterkaitan dengan komponen lainnya seperti kepercayaan dan jaringan. Modal sosial yang merupakan bentuk hubungan yang terjalin memerlukan suatu aturan. Dimana seseorang menjalin suatu hubungan selain untuk berinteraksi, juga memenuhi kebutuhan hingga pertukaran yang mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak yang terlibat. Dimana dalam suatu interaksi

dan pertukaran memerlukan aturan bersama yang menuntut perilaku seseorang. Pertukaran yang dimiliki aturan mengandung hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam pertukaran (Taufik, 2017:6).

Dengan adanya norma ini individu-individu yang terlibat memiliki tanggungjawab menjaga norma yang terbentuk akibat pertukaran. Dimana salah satu pihak melanggar aturan yang disepakati maka orang tersebut akan kehilangan keuntungan para pihak yang terlibat. Apabila kerjasama itu berjalan terus menerus maka akan membentuk suatu jaringan yang di dalamnya terdiri atas kepercayaan hingga saling memperoleh keuntungan, dimana keuntungan itu juga memiliki norma yang menentukan keuntungan itu (Sholihah. 2014: 46).

2.7 Penelitian Terdahulu

Keseluruhan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam mengkaji penelitian ini.

Penelitian Muhamad Fathun Munier, M. Saleh S. Ali, Darmawan Salman (2018), yang berjudul “Relasi Antara Modal Sosial Penyuluh dan Keberhasilan Penyuluhan Pertanian: Kasus Desa Limbung dan Desa Tubajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan”. Metode penelitian ini dilakukan secara *purposive* dengan melihat kualifikasi kelembagaannya yaitu pemula, madya dan lanjut. Modal sosial penyuluh dan keberhasilan penyuluhan pertanian diukur dengan skala *likert* yang kemudian variabel tersebut dianalisis dengan analisis korelasi *Pearson Product Moment Correlation*. Data dianalisis dengan menggunakan program SPSS versi 2.1.

Penelitian Nurul Kholifa (2016), yang berjudul “Pengaruh Modal Sosial terhadap Produktivitas Petani (Studi Kasus di Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif karena data yang digunakan berbentuk angka yang selanjutnya akan diolah untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel dari modal sosial yaitu kepercayaan, partisipasi, jaringan dan norma

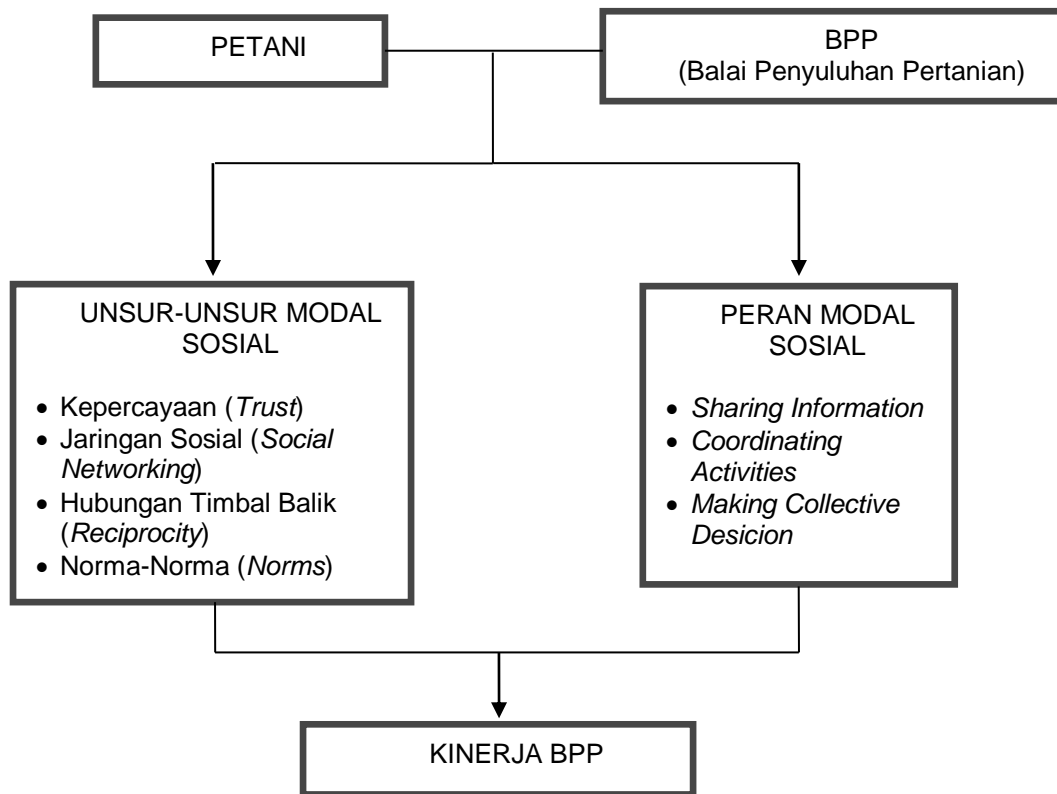
sosial terhadap produktivitas petani di Kabupaten Cilacap. Metode kuantitatif dalam penelitian ini memakai analisis regresi berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel.

2.8 Kerangka Pemikiran

Di Kecamatan Tombolo Pao terdapat 1 unit UPT BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) yang bertugas untuk memberikan penyuluhan pertanian kepada para petani di wilayah sekitar. UPT BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) tersebut merupakan BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) yang menaungi 3 Kecamatan di Kabupaten Gowa, antara lain Kecamatan Tombolo Pao, Kecamatan Tinggi Moncong, dan Kecamatan Parigi. Namun pada UPT BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) tersebut hanya memiliki 9 orang penyuluh yang masing-masing Kecamatan ditugaskan 3 orang penyuluh. Sedangkan di Kecamatan Tombolo Pao terdapat 221 Kelompok Tani yang terdaftar di SK Bupati dan hal ini dapat membuat pengurus BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) dan penyuluh kewalahan dalam melaksanakan program kerja BPP.

BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) memiliki tugas utama yaitu memberikan penyuluhan kepada petani. Selain itu terdapat pula beberapa kinerja yang harus dicapai oleh anggota pengurus BPP (Balai Penyuluhan Pertanian). Namun dalam proses pencapaian kinerja tersebut anggota pengurus BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) sebaiknya memiliki hubungan yang baik dengan para petani setempat. Untuk mengetahui hubungan antara petani dengan anggota pengurus BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) terjalin dengan baik dapat diketahui melalui hubungan atau unsur-unsur modal sosial yang terjalin antaranya yaitu; Kepercayaan (*trust*), Jaringan Sosial (*social networking*), Hubungan Timbal Balik (*reciprocity*), dan Norma-Norma (*norms*).

Berdasarkan unsur-unsur modal sosial tersebut perlu dikaji bahwa unsur-unsur tersebut mempengaruhi proses terlaksananya kinerja BPP (Balai Penyuluhan Pertanian). Secara singkat dapat digambarkan secara sistematis sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Peran Modal Sosial terhadap Kinerja BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.